

Integrating Maqasid al-Shari'ah into Sustainable CSR (Corporate Social Responsibility): Lessons from the SAKA Bakti Pesantren Program

Diar Eka Juliasari

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: diarsusanto0@gmail.com

Abdul Halim

UIN Sunan Ampel Surabaya | Universitas Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Email: halimwahid70@gmail.com

Corresponding Author: Diar Eka Juliasari

Article History: Received November 12, 2025; Received in revised from January 15, 2026: Accepted June 1, 2026; Published; June 26, 2026

How to Cite this Article: Juliasari, D. E., & Halim, A. . (2026). Integrating Maqasid al-Shari'ah into Sustainable CSR (Corporate Social Responsibility): Lessons from the SAKA Bakti Pesantren Program. *Journal of Integrative Sustainability and Ethics*, 2(1), 1–17. Retrieved from <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/jibec/article/view/889>

Abstract: Most Corporate Social Responsibility (CSR) implementations in Indonesia remain confined to short-term philanthropic activities, failing to comprehensively integrate Islamic ethical values. This study examines the implementation of sustainable CSR through the SAKA Bakti Pesantren program, utilizing a *Maqāṣid al-Sharī'ah* framework to evaluate its social, economic, and educational empowerment outcomes within Islamic boarding school (*pesantren*) environments. Employing a qualitative descriptive method, data were gathered through in-depth interviews, participant observation, and documentation of the CSR initiative executed by PGN Saka in Gresik Regency, East Java. The findings reveal that the SAKA Bakti Pesantren program successfully operationalizes the five core pillars of *Maqāṣid al-Sharī'ah*: safeguarding faith (*hiḍḍ al-dīn*), life (*hiḍḍ al-naḥs*), intellect (*hiḍḍ al-'aql*), lineage (*hiḍḍ al-nasl*), and wealth (*hiḍḍ al-māl*). The initiative systematically enhances human resource capacity through skills training and professional certifications while fostering institutional economic independence via sustainable cooperative development. This study underscores that embedding *Maqāṣid al-Sharī'ah* into CSR models establishes long-term social welfare (*maṣlahah*), reinforces corporate social legitimacy, and offers a distinct Islamic economic framework that contributes significantly to the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Corporate Social Responsibility; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Islamic Economics; Sustainable Empowerment; *Pesantren* Development

Pendahuluan

Paradigma *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah bertransformasi dari sekadar aksi filantropi karitatif yang bersifat reaktif menjadi pendekatan terencana berbasis pembangunan kapasitas masyarakat (*sustainable community development*). Dalam wacana manajemen modern, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas pencari laba, melainkan bagian integral dari ekosistem sosial yang berkewajiban menciptakan nilai bersama (*creating shared value*). Transformasi ini menuntut pelaksanaan program tanggung jawab sosial agar mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta memberikan dampak transformatif jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.¹

Di Indonesia, pelaksanaan tanggung jawab sosial korporasi memiliki imperatif yuridis yang mengikat secara formal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas—yang merupakan derivasi operasional dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007—perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terukur. Regulasi ini mengharuskan perusahaan, khususnya di sektor hulu minyak dan gas bumi, untuk mengintegrasikan program CSR ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan guna memitigasi dampak ekologis sekaligus mendongkrak kesejahteraan sosial-ekonomi di sekitar wilayah operasi.

Dalam perspektif ekonomi dan bisnis Islam, tanggung jawab sosial menemukan legitimasi filosofis yang lebih mendalam melalui doktrin *Maqāṣid al-Sharī‘ah* (tujuan-tujuan syariah) dan konsep *maṣlaḥah* (kesejahteraan umum).² Dusuki dan Abdullah menegaskan bahwa etika bisnis Islam memandang korporasi sebagai pemegang amanah moral yang wajib merealisasikan kemaslahatan publik dan mencegah terjadinya mafsadat atau kerusakan lingkungan (*dar’ al-mafāsid*). Kerangka *Maqāṣid al-Sharī‘ah* mengelompokkan kemaslahatan ke dalam lima pilar perlindungan esensial (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Integrasi nilai *Maqāṣid al-Sharī‘ah* menjadi sangat kontekstual dan strategis ketika diarahkan pada pemberdayaan institusi pondok pesantren. Pesantren di Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang kokoh sebagai pusat pendidikan moral serta basis pemberdayaan komunitas di pedesaan.³ Kendati demikian, berbagai pesantren masih menghadapi kendala kelembagaan, seperti rendahnya literasi bisnis pengelola, lemahnya tata kelola manajerial, serta keterbatasan sarana penunjang unit usaha mandiri.⁴ Program CSR berbasis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* memungkinkan proses intervensi tidak hanya berfokus

¹ Jejen Hendar, “Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm,” *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (2023): 104–25, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art6>.

² ‘Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kaylānī, *Qawā‘id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāfi‘ī*; *Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Dār al-Fikr, 2000).

³ Bakhrul Huda, *Bisnis Ritel Pesantren* (Abda Publisher, 2021).

⁴ Bakhrul Huda dkk., “Islamic Philanthropy Model Based on a Waste Bank for Empowering Pesantren Communities: Evidence from Tebuireng Pesantren, Indonesia,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 1 (2026): 71–87, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v25i1.20584>.

pada modal kapital (*hifẓ al-māl*), tetapi juga penguatan kapabilitas intelektual pengelola (*hifẓ al-‘aql*) dan penyiapan generasi santripreneur yang berdaya saing (*hifẓ al-nasl*).⁵

Sebagai perusahaan hulu migas nasional, PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) menjalankan komitmen sosialnya di Kabupaten Gresik melalui sub-program SAKA Bakti Pesantren. Program ini menyasar lembaga pesantren di Kecamatan Ujungpangkah dan Manyar melalui pendekatan terstruktur yang mencakup pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), inkubasi bisnis *Business Model Canvas* (BMC), serta dukungan sarana prasarana unit usaha produktif. Inisiatif ini dirancang untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperkuat kohesi sosial korporasi dengan masyarakat sekitar.

Kajian literatur mengenai implementasi CSR berbasis syariah telah berkembang pesat, namun menyisakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *Maqāṣid al-Sharī‘ah* berfokus pada industri perbankan dan perasuransian syariah, atau terbatas pada diskursus konseptual-normatif yang belum teruji secara empiris pada program komunitas. Di sisi lain, riset CSR di lingkungan pesantren kerap berhenti pada evaluasi luaran (*output*) jangka pendek pelatihan kewirausahaan tanpa melakukan analisis mendalam terhadap integrasi nilai-nilai etika syariah dalam tata kelola usaha.⁶

Secara metodologis dan empiris, terdapat kekosongan literatur (*evidence gap*) terkait penggunaan kelima dimensi *Maqāṣid al-Sharī‘ah* sebagai instrumen evaluasi kualitatif komprehensif pada program CSR sektor industri ekstraktif. Sebagian besar literatur CSR pesantren belum mengkaji bagaimana dimensi *hifẓ al-dīn* hingga *hifẓ al-māl* dioperasionalkan secara seimbang dalam unit usaha riil. Selain itu, isu kesinambungan pendampingan pasca-program (*post-program sustainability*)—seperti pelaporan keuangan berkala, legalitas koperasi, dan monitoring kinerja unit bisnis—masih sangat jarang dieksplorasi secara kritis dalam riset CSR keagamaan.⁷

Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi program SAKA Bakti Pesantren oleh PGN Saka di Kabupaten Gresik melalui lensa *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemanfaatan lima pilar *Maqāṣid al-Sharī‘ah* bukan hanya sebagai konsep normatif, melainkan sebagai kerangka analisis empiris untuk mengukur efektivitas pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pendidikan pesantren, sekaligus memetakan kendala keberlanjutan unit usaha pasca-intervensi program.

⁵ Syahiza Arsad dkk., *Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies*, 6, no. 6 (2015), <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/21180>.

⁶ Hendar, "Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm"; Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility (2007)*," *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (2024): 10–35, <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>; Arsad dkk., *Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies*.

⁷ Kemenkeu RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas," t.t., <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/47tahun2012pp.htm>.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis mekanisme operasionalisasi program SAKA Bakti Pesantren dalam penguatan kapasitas SDM dan sarana usaha; (2) mengevaluasi ketercapaian program berdasarkan lima pilar *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-māl*); dan (3) mengidentifikasi tantangan keberlanjutan tata kelola unit usaha pesantren setelah program pendampingan berakhir. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model evaluasi CSR berbasis ekonomi Islam serta kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan CSR yang inklusif dan berkelanjutan bagi pesantren di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* diintegrasikan ke dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) SAKA Bakti Pesantren yang diinisiasi oleh PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap pemaknaan aktor, dinamika kelembagaan, serta tantangan keberlanjutan unit usaha pesantren secara naturalistik di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Pemilihan informan dan unit analisis dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini diterapkan dengan menetapkan kriteria inklusi spesifik guna menjangkau pihak-pihak yang memiliki informasi kaya (*information-rich cases*) dan terlibat langsung dalam perancangan, pelaksanaan, maupun penerimaan manfaat program. Kriteria penetapan pesantren mitra mencakup: (1) pondok pesantren yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan SKKNI dan inkubasi bisnis *Business Model Canvas* (BMC); (2) telah menerima intervensi sarana-prasarana produktif; serta (3) mengoperasikan unit usaha aktif (koperasi, kantin, ritel, perikanan, atau jasa).⁸

Informan penelitian terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*), yang meliputi: 1) Pihak korporasi pelaksana (*CSR Officer/Community Development Specialist* PGN Saka); 2) Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren penerima manfaat; 3) Tenaga pendidik yang telah lulus sertifikasi kompetensi pendamping koperasi BNSP; 4) Pengelola unit usaha dan koperasi pesantren; 5) Santri dan alumni yang terlibat langsung dalam operasional usaha; dan 6) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan fasilitator pelatihan kewirausahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni; 1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Ini dilakukan oleh peneliti secara semi-

⁸ Mojtaba Vaismoradi dkk., "Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study," *Nursing & Health Sciences* 15, no. 3 (2013): 398–405, <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>.

terstruktur menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang dikembangkan berdasarkan lima dimensi *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*). Wawancara berfokus pada motivasi program, proses transfer pengetahuan bisnis, tata kelola keuangan unit usaha, serta kendala pasca-pendampingan; 2) Observasi Partisipatif Terbatas (*Participant Observation*). Pengamatan langsung dilakukan terhadap operasionalisasi unit usaha di 10 pesantren mitra, aktivitas transaksi santri di koperasi/kantin, pemanfaatan sarana produksi bantuan CSR, serta interaksi pembelajaran kewirausahaan di lingkungan pesantren; 3). Studi Dokumentasi (*Documentary Study*). Dalam aspek ini, Peneliti menganalisis dokumen-dokumen primer dan sekunder, antara lain Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan *Sustainability Report* PGN Saka, kurikulum/modul pelatihan berbasis SKKNI, dokumen proposal perencanaan bisnis (*Business Plan*) berbasis BMC, bukti sertifikasi kompetensi BNSP, serta laporan pembukuan/legalitas koperasi pesantren.

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) model Braun dan Clarke (2006). Prosedur analisis data dijalankan melalui enam tahapan berurutan:⁹

1. *Familiarization with data*: Membaca dan membaca ulang seluruh transkrip wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan dokumen program secara saksama.
2. *Generating initial codes*: Menyusun kode-kode awal dari kutipan bermakna terkait intervensi CSR, tata kelola usaha, dan dampak sosial-ekonomi.
3. *Searching for themes*: Mengelompokkan kode-kode awal ke dalam tema-tema potensial berdasarkan kerangka konseptual *Maqāṣid al-Sharī'ah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) serta tema dinamika keberlanjutan tata kelola.
4. *Reviewing themes*: Memeriksa kembali kecocokan tema dengan data empiris mentah dan peta kode secara menyeluruh
5. *Defining and naming themes*: Merumuskan definisi konseptual yang jelas dan penamaan yang tepat untuk setiap dimensi *Maqāṣid* dan dimensi keberlanjutan program.
6. *Producing the report*: Mengintegrasikan narasi tematik, kutipan verbatim informan, data matriks sarana prasarana, serta sintesis teoretis ke dalam pembahasan artikel.

Validasi Data

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*) dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari

⁹ <https://casrai.org/guides/purposive-sampling>

satu kategori informan (misalnya *CSR Officer* PGN Saka) kepada kategori informan lain (pengasuh pesantren, pendamping usaha, dan santri). Triangulasi teknik dilakukan dengan menyilangkan data hasil wawancara dengan bukti observasi lapangan serta dokumen administratif (seperti proposal bisnis BMC dan akta legalitas koperasi). Selain itu, dilakukan *member checking* kepada informan kunci guna memastikan keakuratan interpretasi peneliti terhadap pernyataan dan fenomena yang diteliti.¹⁰

Hasil

Mekanisme Pelaksanaan Program SAKA Bakti Pesantren

Implementasi program tanggung jawab sosial SAKA Bakti Pesantren oleh PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) di Kabupaten Gresik dirancang melalui intervensi bertahap yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi pondok pesantren. Pendekatan ini tidak memosisikan CSR sebagai skema donasi karitatif spontan, melainkan sebagai proses pemberdayaan terstruktur yang menysasar sepuluh pondok pesantren di wilayah ring satu operasional perusahaan, yaitu Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Manyar. Kerangka intervensi program mencakup tiga tahapan berkesinambungan: pelatihan kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), inkubasi bisnis melalui pemodelan *Business Model Canvas* (BMC), serta penyaluran sarana-prasarana penunjang usaha produktif.

Tahap awal intervensi difokuskan pada penguatan literasi dan kapasitas manajerial tenaga pendidik serta pengelola usaha pesantren melalui pelatihan terstruktur. Kurikulum pelatihan mengacu pada SKKNI Bidang Pendamping Koperasi, yang mencakup kompetensi analisis kelayakan usaha mikro, tata kelola manajemen koperasi syariah, pencatatan transaksi keuangan, serta strategi pelayanan konsumen. Proses pembelajaran dilaksanakan secara partisipatif melalui metode simulasi kasus dan diskusi kelompok terarah. Pada akhir fase pelatihan, seluruh peserta diikutsertakan dalam uji kompetensi resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memperoleh sertifikasi kompetensi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tahap kedua merupakan fase inkubasi bisnis, di mana para peserta yang telah tersertifikasi dibimbing untuk menyusun rencana bisnis riil menggunakan instrumen BMC. Penerapan BMC melatih pengelola pesantren untuk berpikir analitis dalam memetakan sembilan elemen dasar usaha, meliputi segmentasi pasar santri dan masyarakat sekitar, penetapan proposisi nilai produk halal, optimalisasi saluran distribusi internal, perancangan struktur biaya yang efisien, serta diversifikasi arus pendapatan. Dokumen perencanaan bisnis yang dihasilkan oleh masing-masing pesantren kemudian dipresentasikan dan diverifikasi oleh tim fasilitator sebagai syarat kelayakan teknis sebelum menerima bantuan peralatan fisik.

Tahap ketiga adalah penyaluran sarana dan prasarana penunjang usaha yang disesuaikan secara spesifik dengan hasil dokumen perencanaan bisnis masing-masing

¹⁰ Nancy Carter dkk., "The Use of Triangulation in Qualitative Research," *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (2014): 545–47, <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>.

lembaga. Pengadaan sarana menerapkan prinsip *cost-sharing* (pembagian beban pembiayaan) antara PGN Saka dan pihak pesantren guna menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) serta komitmen kelembagaan dalam merawat aset produktif tersebut. Ragam unit usaha yang dikembangkan oleh sepuluh pesantren mencakup sektor ritel/kantin, budidaya perikanan air tawar (lele), jasa servis kendaraan bermotor, hingga unit promosi pemasaran digital.

Table 1. Pemetaan Unit Usaha dan Distribusi Dukungan Sarana Prasarana CSR SAKA Bakti Pesantren

No	Nama Pondok Pesantren	Jenis Usaha yang Dikembangkan	Dukungan Sarana Prasarana CSR
1	PP Darul Amin	Toko / Kantin Pesantren	1 unit etalase, 1 unit <i>magic cooker</i> , 1 unit kompor & selang gas, 1 unit <i>cup sealer</i>
2	PP Roudlotul Hikmah	Budidaya Ikan Lele	1 set terpal kolam lele, 6.000 bibit lele (ukuran 8–9 cm), pakan & obat lele
3	PP Mambaul Ihsan	Toko / Kantin Pesantren	1 unit <i>freezer</i> , 3 unit kompor gas, 3 unit selang regulator
4	PP Al Ittihad	Kantin & Kuliner Santri	4 unit kursi, 1 set kanopi pelindung, 4 unit meja kantin
5	PP Al Muhajirin	Kantin & Toko Kelontong	Penambahan daya listrik 2.200 VA, pengadaan stok barang dagangan
6	PP Al Mustaniroh	Jasa Servis & Jual Beli Motor	1 unit laptop Lenovo untuk administrasi dan pembukuan usaha
7	PP Ushulul Hikmah Al Ibrohimi	Ritel & Kantin Sekolah	2 unit printer multifungsi (Epson L3250) untuk unit fotokopi/ritel
8	PP Al Muniroh	Budidaya Perikanan Lele	2 unit pompa air sirkulasi kolam budidaya
9	PP Al Amin Al Fatih	Ritel Makanan & Minuman	Peralatan <i>live streaming marketing</i> (1 unit <i>webcam</i> Logitech, kabel USB 20m, audio mixer Behringer USB)

No	Nama Pondok Pesantren	Jenis Usaha yang Dikembangkan	Dukungan Sarana Prasarana CSR
10	PP Al Fithroh	Ritel Toko Pesantren	1 unit <i>showcase</i> pendingin minuman

Capaian Program dalam Tinjauan Dimensi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dampak operasional dari implementasi program SAKA Bakti Pesantren dianalisis menggunakan lima pilar perlindungan esensial dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*). Pada dimensi pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), program berhasil menjadikan unit usaha pesantren sebagai media implementasi etika muamalah Islam secara empiris. Aktivitas bisnis di lingkungan pesantren tidak semata-mata berorientasi pada akumulasi profit material, melainkan menekankan prinsip keadilan timbangan, transparansi margin harga, kehalalan rantai pasok barang, serta penolakan terhadap unsur riba dan spekulasi (*gharar*). Salah seorang pengasuh pondok pesantren menegaskan:

"Program ini memberikan sarana nyata bagi santri dan dewan guru untuk mempraktikkan fikih muamalah secara langsung; kita membuktikan bahwa kemandirian ekonomi pesantren dapat diraih dengan tetap memegang teguh batas-batas syariat."

Pada dimensi pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), program berkontribusi langsung terhadap peningkatan standar hidup dan kesehatan warga pesantren. Keberadaan kantin yang higienis serta unit budidaya ikan lele menyediakan pasokan pangan bergizi dengan harga yang sangat terjangkau bagi santri. Selain itu, surplus finansial yang dihasilkan dari unit usaha disisihkan oleh pengurus pesantren untuk mensubsidi biaya hidup dan konsumsi harian santri yang berasal dari keluarga prasejahtera. Salah seorang pengelola unit usaha menyampaikan:

"Laba dari unit usaha kantin dan kolam lele sangat membantu operasional dapur pondok, sehingga kebutuhan makan bergizi para santri tetap tercukupi secara mandiri."

Pada dimensi pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), intervensi CSR memberikan lonjakan kapasitas intelektual dan literasi bisnis bagi para tenaga pendidik. Sebelum program berjalan, asatidz di pesantren dampingan hanya berfokus pada pengajaran kurikulum keagamaan dan belum memiliki pemahaman mengenai manajemen organisasi bisnis modern. Melalui pelatihan SKKNI dan sertifikasi BNSP, para tenaga pendidik memperoleh keahlian terstruktur dalam menyusun pembukuan arus kas sederhana, menghitung titik impas (*break-even point*), menganalisis potensi pasar lokal, serta mengintegrasikan metode BMC ke dalam materi ajar ekstrakurikuler santri.

Pada dimensi pemeliharaan keturunan dan keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*), program ini berfungsi sebagai wadah kaderisasi kewirausahaan santri (*santripreneur*) melalui pendekatan *learning by doing*. Santri dilibatkan secara bergiliran dalam operasional harian koperasi, pencatatan transaksi kasir, pemeliharaan sanitasi kolam lele, hingga pengelolaan pemasaran digital berbasis media sosial. Keterlibatan langsung ini menanamkan etos kerja produktif, integritas kepemimpinan, dan kemandirian mental generasi muda santri sebagai bekal kemandirian pasca-menyelesaikan pendidikan di pesantren.

Pada dimensi pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), program meletakkan fondasi tata kelola aset yang akuntabel serta mendorong legalisasi unit usaha. Lima dari sepuluh pesantren dampingan berhasil mendirikan koperasi berbadan hukum resmi, dan tiga di antaranya berhasil terdaftar dalam ekosistem program *One Pesantren One Product* (OPOP) Jawa Timur. Legalitas kelembagaan ini memisahkan secara tegas antara keuangan pribadi pengasuh dengan aset produktif pesantren, sehingga memitigasi risiko sengketa aset serta membuka akses kemitraan dengan lembaga perbankan syariah dan distributor formal.

Dinamika Keberlanjutan Pasca-Intervensi Program

Kendati program menunjukkan capaian signifikan pada fase implementasi awal, penelitian lapangan menemukan tantangan mendasar pada aspek keberlanjutan jangka panjang (*post-program sustainability*). Terdapat fenomena penurunan intensitas pendampingan yang tajam setelah fase penyerahan sarana prasarana dan uji sertifikasi selesai dilaksanakan. Ketiadaan skema supervisi berkala dari pihak perusahaan atau konsultan pelaksana menyebabkan pengelola usaha di beberapa pesantren mengalami kebingungan teknis dalam mengatasi fluktuasi pasar dan risiko operasional.

Hasil wawancara mendalam mengonfirmasi bahwa sebagian besar pengelola koperasi pesantren masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan bulanan yang terstandarisasi, melakukan audit persediaan barang secara sistematis, serta memperluas segmentasi pasar ke luar lingkungan internal pesantren. Salah seorang pengurus koperasi mengungkapkan:

"Selama masa pelatihan, kami sangat terbantu oleh arahan fasilitator. Namun setelah program selesai dan bantuan alat diserahkan, kami dibiarkan berjalan sendiri. Ketika terjadi kendala pembukuan atau penurunan penjualan, kami tidak tahu harus berkonsultasi ke mana."

Data observasi lapangan memperlihatkan bahwa ketiadaan peta jalan pelepasan (*exit strategy roadmap*) yang matang membuat sebagian unit usaha rentan stagnan dan hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan internal skala mikro tanpa adanya ekspansi bisnis yang progresif.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program SAKA Bakti Pesantren oleh PGN Saka telah berhasil menggeser orientasi CSR korporasi hulu migas dari sekadar filantropi donatif menuju pendekatan pembangunan kapasitas komunitas berkelanjutan (*sustainable community development*). Langkah PGN Saka yang memadukan peningkatan kompetensi tersertifikasi BNSP, penyusunan model bisnis BMC, dan stimulus sarana produksi berbasis *cost-sharing* mencerminkan penerapan prinsip *Creating Shared Value* (CSV). Dalam kerangka ini, perusahaan tidak hanya mematuhi kewajiban regulasi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, melainkan secara aktif membangun legitimasi sosial (*social license to operate*) di sekitar wilayah kerja operasional dengan cara memperkuat resiliensi ekonomi institusi pesantren mitra.¹¹

Dari sudut pandang teoretis ekonomi Islam, integrasi kerangka *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam program ini memberikan kontribusi penting dalam mentransformasi konsep syariah dari tataran wacana normatif-tekstual menjadi instrumen evaluasi empiris yang aplikatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Dusuki dan Abdullah,¹² etika bisnis Islam menuntut tanggung jawab sosial korporasi untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki (*al-maṣlahah al-mu'tabarah*) dengan menjaga keseimbangan antara dimensi material dan spiritual pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap lima pilar *Maqāsid* membuktikan bahwa program CSR mampu menyentuh aspek perlindungan nilai-nilai fundamental manusia secara terpadu tanpa saling menegasikan.

Pada pilar *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) dan *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), penelitian ini mengonfirmasi bahwa unit usaha ekonomi di pesantren berfungsi ganda sebagai laboratorium etika muamalah sekaligus instrumen pemenuhan kebutuhan dasar. Berbeda dengan model CSR korporasi sekuler yang semata-mata mengukur keberhasilan dari kenaikan omzet moneter, CSR berbasis *Maqāsid* menempatkan penegakan etika bisnis halal, keadilan transaksi, dan perbaikan gizi warga pondok sebagai indikator utama kemaslahatan. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas ekonomi pesantren mampu memperkuat kohesi sosial dan spiritualitas kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam literatur etika ekonomi Islam.

Pada dimensi *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *ḥifẓ al-nasl* (keberlanjutan generasi), intervensi program terbukti berhasil mengakselerasi pembentukan modal manusia (*human capital accumulation*) di lingkungan pesantren. Sertifikasi kompetensi BNSP yang diperoleh para tenaga pendidik memecahkan kebuntuan pedagogis yang selama ini dialami pesantren tradisional, di mana asatidz kini memiliki legitimasi keahlian untuk mentransfer literasi bisnis secara metodologis kepada para santri. Pola kaderisasi *santripreneur* melalui keterlibatan langsung dalam rantai operasional bisnis menciptakan regenerasi wirausahawan muda Islam yang memiliki ketahanan moral dan keterampilan teknis. Temuan ini memperkuat sintesis Hendar bahwa integrasi kapabilitas manajerial ke dalam

¹¹ Prem Sagar Menghwar dan Antonio Daood, "Creating Shared Value: A Systematic Review, Synthesis and Integrative Perspective," *International Journal of Management Reviews* 23, no. 4 (2021): 466–85, <https://doi.org/10.1111/ijmr.12252>.

¹² Dusuki dan Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*."

kepemimpinan pesantren menjadi faktor determinan dalam membentuk keunggulan kompetitif lembaga pendidikan Islam di era modern.¹³

Selanjutnya, pada dimensi *hifz al-māl* (perlindungan harta), capaian formalisasi badan hukum lima koperasi pesantren serta integrasi tiga unit usaha ke dalam program OPOP Jawa Timur menjadi lompatan struktural yang signifikan. Langkah ini mentransformasi unit usaha pesantren dari praktik usaha tradisional yang bercampur dengan kas pribadi pengasuh menuju tata kelola korporasi mini yang akuntabel, transparan, dan *bankable*. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, formalisasi kelembagaan dan pembukuan merupakan bentuk tertinggi dari ikhtiar menjaga harta publik umat dari potensi salah urus (*mismanagement*), sengketa kepemilikan, dan degradasi nilai aset.¹⁴

Kendati demikian, analisis kritis terhadap temuan lapangan mengungkap adanya paradoks mendasar pada fase pasca-intervensi program (*post-intervention phase*). Berhentinya pendampingan intensif pasca-penyerahan aset mengindikasikan bahwa perancangan program CSR belum sepenuhnya mengadopsi siklus manajemen pemberdayaan masyarakat yang utuh. Dalam teori pemberdayaan komunitas, fase transisi dan strategi pelepasan (*exit strategy*) memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa komunitas dampingan benar-benar mencapai taraf kemandirian mandiri (*self-reliance*) sebelum intervensi eksternal dihentikan total. Kegagalan menyediakan mekanisme supervisi berkala berisiko menurunkan efektivitas investasi sosial yang telah ditanamkan oleh perusahaan.¹⁵

Dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, fenomena kemandekan manajerial pasca-program ini menunjukkan belum tercapainya prinsip keberlanjutan kemaslahatan (*istimrāriyyah al-maṣlahah*). Teori kemaslahatan menghendaki agar manfaat yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik atau aksi korporasi bersifat langgeng dan mampu mencegah timbulnya kesulitan baru (*raf' al-haraj*) di kemudian hari. Ketidadaan jaringan pasar eksternal dan rendahnya literasi akuntansi tingkat lanjut pada sebagian pengelola pesantren membuktikan bahwa transfer kapasitas belum tuntas pada level operasional strategis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa model pemberdayaan CSR berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* membutuhkan rekonstruksi paradigma evaluasi. Evaluasi program CSR tidak boleh berhenti pada pelaporan luaran (*output-based reporting*)—seperti jumlah santri yang dilatih atau unit mesin yang disalurkan—melainkan harus bergeser pada evaluasi dampak keberlanjutan (*impact and sustainability evaluation*). Korporasi dituntut untuk merancang program pendampingan multi-tahun (*multi-year engagement*), memfasilitasi kemitraan rantai pasok dengan industri, serta menyediakan sistem monitoring

¹³ Hendar, "Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm."

¹⁴ M. Luthfillah Habibi dkk., "Islamic Jurisprudential Approaches to Pesantren Financial Reporting: Constructing a Framework for Legalized Accounting Practices," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 15, no. 2 (2025): 100–126, <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.2.100-126>.

¹⁵ Novi Wulandari Widiyanti dkk., "Redefining ESG Disclosure Through The Framework of Maqasid Shariah: A Study on PTPN," *Proceeding ICONIES Faculty of Economics UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2025.

digital berkala agar unit usaha pesantren mampu tumbuh menjadi entitas bisnis yang mandiri, kompetitif, dan berdaya maslahat luas bagi umat.¹⁶

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program CSR SAKA Bakti Pesantren oleh PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) telah mentransformasi model tanggung jawab sosial korporasi hulu migas dari skema filantropi karitatif menjadi pembangunan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi lima pilar *Maqāṣid al-Sharī'ah*, program ini terbukti efektif merealisasikan kemaslahatan terpadu melalui penguatan etika muamalah (*ḥifẓ al-dīn*), pemenuhan nutrisi dan kesejahteraan warga pondok (*ḥifẓ al-nafs*), peningkatan literasi bisnis melalui sertifikasi kompetensi BNSP (*ḥifẓ al-'aql*), kaderisasi wirausahawan santri (*ḥifẓ al-nasl*), serta penataan legalitas koperasi berbadan hukum dan integrasi jejaring OPOP (*ḥifẓ al-māl*). Kendati demikian, efektivitas pencapaian kemaslahatan jangka panjang masih terhambat oleh kelemahan transisi pendampingan pasca-program, di mana keterbatasan literasi akuntansi lanjut dan minimnya akses pasar luar menyebabkan sebagian unit usaha belum mencapai kemandirian operasional secara optimal.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur etika bisnis Islam dengan membuktikan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat dioperasionalkan sebagai kerangka evaluasi empiris yang terukur untuk menilai program CSR di luar sektor perbankan syariah, khususnya pada institusi keagamaan tradisional seperti pesantren. Studi ini memperluas diskursus *Creating Shared Value* (CSV) dengan menunjukkan bahwa penciptaan nilai bersama tidak hanya berfokus pada dimensi ekonomi dan lingkungan, melainkan mencakup dimensi penguatan spiritualitas dan modal sosial komunitas lokal. Integrasi prinsip *istimrāriyyah al-maṣlahah* (keberlanjutan kemaslahatan) dalam penelitian ini menegaskan bahwa kemaslahatan dalam etika Islam menuntut jaminan kebermanfaatan yang langgeng, bukan sekadar pemenuhan luaran kegiatan sesaat.

Secara manajerial dan praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya restrukturisasi desain program CSR oleh korporasi dan pemangku kepentingan terkait. Perusahaan dituntut untuk tidak menghentikan intervensi setelah penyerahan sarana fisik, melainkan wajib menyusun strategi pelepasan yang komprehensif melalui skema pendampingan tahun jamak, penguatan sistem akuntansi digital, serta pembentukan ekosistem rantai pasok yang menghubungkan produk pesantren dengan pasar korporasi dan industri regiona. Bagi pengelola pesantren, penguatan komitmen tata kelola kelembagaan, pemisahan kas usaha dari kas pribadi pengasuh, dan keterbukaan terhadap inovasi pemasaran modern merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga keberlanjutan unit usaha produktif.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka peluang bagi agenda riset lanjutan. Keterbatasan utama terletak pada ruang lingkup geografis yang terbatas pada 10 pesantren di Kabupaten Gresik serta pendekatan kualitatif deskriptif yang belum

¹⁶ Menghwar dan Daood, "Creating Shared Value."

mengukur dampak ekonomi moneter (seperti tingkat pertumbuhan omzet, margin laba bersih, dan rasio efisiensi biaya) secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) mengembangkan indeks pengukuran komposit kinerja CSR berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* (*Maqasid-based CSR Index*) dengan metode kuantitatif atau *mixed-methods*; (2) melakukan studi komparatif lintas sektor industri di berbagai wilayah operasi migas; serta (3) melakukan studi longitudinal guna memotret daya tahan (*resilience*) dan tingkat keberlangsungan hidup (*survival rate*) unit usaha pesantren dalam rentang waktu multi-tahun pasca-intervensi CSR.

Referensi

- ‘Abd al-Rahmān Ibrāhīm al-Kaylānī. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāfi'ī; 'Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Dār al-Fikr, 2000.
- Arsad, Syahiza, Rahayati Ahmad, Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Roshima Said, dan Yusuf Haji-Othman. *Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies*. 6, no. 6 (2015). <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/21180>.
- Carter, Nancy, Denise Bryant-Lukosius, Alba DiCenso, Jennifer Blythe, dan Alan J. Neville. “The Use of Triangulation in Qualitative Research.” *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (2014): 545–47. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. “Maqasid al-Sharī'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*.” *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (2024): 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.
- Habibi, M. Luthfillah, Moch Mahsun, Nur Asnawi, Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, dan Sirajul Arifin. “Islamic Jurisprudential Approaches to Pesantren Financial Reporting: Constructing a Framework for Legalized Accounting Practices.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 15, no. 2 (2025): 100–126. <https://doi.org/10.15642/elqist.2025.15.2.100-126>.
- Hendar, Jejen. “Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm.” *Prophetic Law Review* 5, no. 1 (2023): 104–25. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art6>.
- Huda, Bakhrul. *Bisnis Ritel Pesantren*. Abda Publisher, 2021.
- Huda, Bakhrul, Mochammad Andre Agustianto, Mohammad Majduddin, dan Abdul Hakim. “Islamic Philanthropy Model Based on a Waste Bank for Empowering Pesantren Communities: Evidence from Tebuireng Pesantren, Indonesia.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 25, no. 1 (2026): 71–87. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v25i1.20584>.
- Menghwar, Prem Sagar, dan Antonio Daood. “Creating Shared Value: A Systematic Review, Synthesis and Integrative Perspective.” *International Journal of Management Reviews* 23, no. 4 (2021): 466–85. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12252>.
- RI, Kemenkeu. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.” t.t. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/47tahun2012pp.htm>.
- Vaismoradi, Mojtaba, Hannele Turunen, dan Terese Bondas. “Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting a Qualitative Descriptive Study.” *Nursing & Health Sciences* 15, no. 3 (2013): 398–405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>.

Widiyanti, Novi Wulandari, Agung Budi Sulistiyo, Imamatin Listya Putri, dan Muhammad Dhito Fakhurrozi. "Redefining ESG Disclosure Through The Framework of Maqasid Shariah: A Study on PTPN." *Proceeding ICONIES Faculty of Economics UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2025.